

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia ini terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, pulau-pulau dan lebih kebudayaan, upaya menguraikan kondisi hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia bukanlah perkara mudah. Banyaknya suku dengan berbagai adat istiadat inilah yang telah mengkonstruksi perempuan dan laki-laki. Dari berbagai suku dan adat istiadat tersebut masih akan ditambah lagi dengan konstruksi masyarakat yang dibentuk oleh perbedaan kelas sosial, agama dan politik (Murniati, 2004:85-86)

Sebagian masyarakat Indonesia menganut budaya patriarki, seperti contoh saja masyarakat Jawa pada awalnya menganut budaya bilineal yakni posisi laki-laki dan perempuan sama haknya dalam mengambil keputusan. Namun pada masyarakat Jawa lain, mempunyai ciri masyarakat yang berbeda, perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat desa yang bilineal berubah menjadi patrilineal (Murniati, 2004:87-89).

Budaya patriarki yang telah mengakar di Negara Indonesia menjadikan maskulinitas sangat dominan dimanapun. Nilai-nilai dominan inilah yang menjadi kriteria dalam dunia politik. Hal ini dapat terlihat secara kasat mata pada kebijakan banyak yang diambil tanpa mementingkan kaum perempuan

dan tidak pro terhadap perempuan. Selain itu cara penyelesaian konflik dalam memperebutkan kekuasaan adalah merupakan contoh budaya patriarki yang dominan dalam panggung politik. (*Sumber: jurnal ilmiah: <http://apssi-sosiologi.org>. Argyo Demartoto, diakses pada hari senin, 04 Januari 2015 pukul 01.13*)

Provinsi Lampung memiliki keragaman budaya. Masyarakat Lampung ialah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas etnis yang masing-masing masih memiliki eksistensi nilai-nilai budaya cukup kuat sebagai referensi pola persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik secara individual maupun kelompok. Nilai-nilai budaya tersebut berpengaruh dalam konteks kehidupan berpolitik baik mendorong ataupun menghambat. (*sumber jurnal ilmiah: <http://apssi-sosiologi.org>. Sindung Haryanto. Diakses pada Hari Senin, 04-Januari-2015. Pukul 11.46 WIB*)

Pada dasarnya budaya patriarki berlaku secara menyeluruh pada semua budaya, namun demikian terdapat variasi di dalamnya. Variasi tersebut meliputi berbagai aspek seperti misalnya: jenis-jenis pekerjaan domestik tertentu yang boleh dilakukan laki-laki, jenis-jenis pekerjaan publik tertentu yang boleh dimasuki perempuan, relasi laki-laki dan perempuan dalam pembuatan keputusan rumah tangga, nilai-nilai yang berkaitan dengan relasi *gender* dan sebagainya.

Variasi tersebut yang perlu dipahami mengingat perbedaan tersebut memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. (*sumber jurnal ilmiah: <http://apssi-sosiologi.org>. Sindung Haryanto. Diakses pada Hari Senin, 04-Januari-2015. Pukul 11.46 WIB*)

Dalam jurnal penelitian Sindung Hariyanto, yang meneliti tentang etnisitas perempuan dalam bidang politik yang dilakukan di Desa Gedung Agung (Tanggamus) sebagai wakil dari etnis Semendo, dan Kelurahan Metro Timur sebagai wakil dari etnis Jawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan peran politik perempuan antara perempuan etnis Semendo dan Etnis Jawa. (*sumber jurnal ilmiah: <http://apssi-sosiologi.org>. Sindung Haryanto. Diakses pada Hari Senin, 04-Januari-2015. Pukul 11.46 WIB*)

Dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, etnis Semendo dan etnis Jawa hampir mendekati kesamaan, yaitu ada pada perempuan. Sedangkan dalam bentuk komunikasi politik, etnis Semendo dan etnis Jawa juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan yaitu adanya musyawarah terlebih dahulu dalam menentukan pilihan politik, bahkan peran perempuan lebih tinggi dalam menentukan pilihan politik. Selanjutnya mengenai sosialisasi politik etnis Semendo tidak banyak memberikan pengarahan kepada anaknya dalam rangka menentukan pilihan politiknya. Sedangkan etnis Jawa lebih banyak memberikan pengarahan kepada anaknya dalam menentukan pilihan

Dalam sosialisasi politiknya etnis semendo terlihat lebih baik dari etnis Jawa karena memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan politik kepada

anaknyanya. Namun etnis Jawa lebih kosmopolitan dalam menunjukkan kesetaraan gender di banding perempuan etnis Semendo. Secara umum penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan di kedua etnis hampir tidak menemui hambatan yang berarti dalam mengikuti kegiatan politik. (*sumber jurnal ilmiah: <http://apssi-sosiologi.org>. Sindung Haryanto. Diakses pada Hari Senin, 04-Januari-2015. Pukul 11.46 WIB*)

Di Lampung, peran perempuan khususnya dalam bidang politik, selalu menarik untuk dibahas, apa lagi masyarakat ini masih menganut budaya patriarki yang sangat kuat. Peran dan partisipasi perempuan dalam segala bidang terasa perlu terus didorong naik ke permukaan. Bagaimana stereotip terhadap perempuan sebagai kaum yang selalu dianggap lemah, tidak patut mengatur dan memimpin, tidak memerlukan pendidikan tinggi karena hanya akan berada di rumah dan sebagainya itu mendegradasi serta terus menihilkan peran perempuan dalam kehidupan sosial politik juga kepemimpinan dalam masyarakat (Radar Lampung, Rabu, 29 Januari 2014)

Hadianti mengatakan, partisipasi politik perempuan tidak melulu harus ikut serta ke dalam partai politik atau menjadi calon anggota legislatif atau secara profesional masuk dalam struktur politik. Selanjutnya, ia mengatakan juga bahwa: “Namun lebih substantif dan harus dilihat adalah sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstitusional mampu mengakomodasi hak-hak

kaum perempuan. Salah satu yang paling krusial adalah hak memilih dan dipilih dalam struktur kehidupan sosial politik masyarakat” (Radar Lampung, Rabu 29 Januari 2014).

Selanjutnya, mengutip pernyataan dari guru besar Universitas Hasanudin Farida Nurland yang mengidentifikasi beberapa masalah dan kendala dalam partisipasi politik perempuan. Pertama, budaya Indonesia yang kental dengan budaya Feodalistik dan Patriarki. Kedua, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama. Ketiga, hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin dari lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya patriarki disegala tingkatan (Radar Lampung , Rabu 29 Januari 2014)

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis dengan melihat lingkungan dimana penulis tinggal di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, pada masyarakat etnis Lampung anak laki-laki etnis Lampung sangat diperlakukan istimewa dan diperjuangkan hak pendidikannya, sedangkan anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penduduk perempuan etnis Lampung yang berjumlah 1293 jiwa dari keseluruhan penduduk perempuan di Desa Gunung Sugih sebesar 1790 jiwa. (Data Desa, tahun 2015)

Lulusan Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disingkat SMP) sebesar 743 jiwa, selanjutnya lulusan Sekolah Dasar (selanjutnya di Singkat SD) dan tidak bersekolah total sebesar 233 jiwa, tingkat Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disingkat SMA) 234 jiwa dan tingkat pendidikan S1 hanya

sebesar 83 jiwa. dibanding dengan laki-laki etnis Lampung yang berjumlah 1165 jiwa tingkat pendidikan S1 lebih banyak dari pada perempuannya yaitu sebesar 732 jiwa. (Data Desa, Tahun 2015)

Setelah lulus dari SMP perempuan merasa cukup untuk sekolah dan orang tua pun tidak mendukung anak perempuannya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, sangat wajar jika kekurangan potensi perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih yaitu salah satunya dikarenakan kurangnya pendidikan hal tersebut berdampak pada munculnya rasa minder untuk terjun ke sektor publik.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perempuan di desa ini begitu pasif. Apakah memang perempuan tidak tanggap atautkah ada larangan dari pihak aparat desa. Hal ini menjadi sebab penulis tertarik untuk meneliti proses budaya politik yang berjalan di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Pada pengamatan awal penulis, terhadap tingkah laku perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yakni dengan bertepatan dengan lokasi tempat tinggal penulis. Bahwa perempuan etnis Lampung di desa ini memang sangat menjaga kehormatannya di depan laki-laki (suami) dengan tidak pernah membantah apa kata suami, mengurus anak-anaknya setiap hari dengan baik, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Perempuan di desa ini sangat takut dianggap membangkang jika tidak menuruti apa kata laki-laki (suami).

Bahkan dalam urusan politik pun harus ikut apa kata laki-laki (suami/ayah) tidak ada sistem demokrasi di dalam keluarga.

Dalam pengambilan keputusan di ranah publik laki-laki selalu mendominasi kaum perempuan, seperti halnya di ranah publik, contoh musyawarah desa atau rapat desa tidak pernah terlihat kaum perempuan etnis Lampung ikut hadir bahkan ikut andil dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di desa ini tidak pernah dilibatkan dalam urusan publik. (Data Kehadiran Rapat Desa)

Perempuan terlihat kurang gerak dan berkembang di desanya sendiri dikarenakan kekuatan budaya patriarkinya. Banyak hak-hak yang terenggut dari perempuan. Jika dalam urusan desa saja perempuan tidak mampu ikut serta, apa lagi dalam konteks yang luas seperti berpolitik pada tingkat daerah, provinsi bahkan nasional.

Meskipun tidak selalu terdapat korelasi antara budaya/ideologi patriarki dengan sistem kekerabatan masyarakat, terdapat dugaan cukup kuat yang melandasi pemikiran penulis untuk meneliti tentang budaya politik perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Karena penulis melihat keterlibatan perempuan di Desa Gunung Sugih ini sangat kurang.

Perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih ini merasa apapun keputusan yang diambil oleh pihak laki-laki adalah keputusan akhir, sehingga perempuan tidak dapat lagi menyampaikan pendapatnya, dengan kata lain

perempuan tidak dianggap atau dirasa cukup untuk mengurus pekerjaan rumah tangga saja sehingga apapun keputusannya dan apapun hasilnya perempuan mau atau tidak mau harus menerimanya. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara sistem kekerabatan dengan drajat kekentalan ideologi patriarki yang berkembang di suatu masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya politik perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya politik perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi dan pemikiran bagi studi ilmu pemerintahan sehingga dapat mengembangkan teori-teori khususnya teori *gender* dan budaya politik.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintahan desa dan masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran dalam melibatkan perempuan dalam urusan politik di desa atau urusan pemerintahan di desa tanpa membedakan atau melihat dari latar belakang etnis, sehingga kualitas diri perempuan di desa menjadi semakin terlihat dan dapat ikut serta membangun kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih berwarna.